



Analisis Efektivitas Program Jaminan Kecelakaan Kerja pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Cilandak Jakarta Selatan

Farrel Jabat Handimsah Putra¹, Abdul Rahman²

¹⁻²Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Jl. K.H Ahmad Dahlan, Cirendeu, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan 15419

Korespondensi penulis: farreljabat13@gmail.com

Abstract. *Effectiveness is a fundamental component that functions to achieve the goals and objectives that have been set in an organization or program. BPJS organizes the Work Accident Insurance (JKK) program to provide protection and a sense of security to workers against the risk of work accidents in the form of financial support. This research was conducted using a qualitative approach, using data collection techniques in the form of interviews, field observations, and documentation reviews. The data analysis process includes the stages of data reduction, information presentation, and drawing conclusions. To ensure the validity of the data, this study uses a triangulation method that includes source triangulation, technique triangulation, and time triangulation. The findings of this study indicate that in general the implementation of the work accident insurance program at BPJS Ketenagakerjaan has been carried out effectively, in accordance with the three main indicators of effectiveness used as references in this study. However, in the indicator of achieving program objectives, there are still several targets that have not been fully realized. Therefore, it can be concluded that the Work Accident Insurance program at the BPJS Ketenagakerjaan Cilandak Branch Office, South Jakarta, has shown good effectiveness, although there is still room for improvement, especially in terms of achieving program objectives as a whole.*

Keywords: *Effectiveness, Work Accident Insurance, Analysis*

Abstrak. Efektivitas menjadi komponen fundamental yang berfungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi atau program. BPJS menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) untuk memberikan perlindungan perlindungan serta rasa aman kepada para tenaga kerja terhadap risiko kecelakaan kerja dalam bentuk dukungan finansial. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi lapangan, dan telaah dokumentasi. Proses analisis data mencakup tahap reduksi data, penyajian informasi, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan metode triangulasi yang mencakup triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program jaminan kecelakaan kerja di BPJS Ketenagakerjaan telah terlaksana dengan efektif, sesuai dengan tiga indikator utama efektivitas yang dijadikan rujukan dalam studi ini. Namun demikian, pada indikator pencapaian tujuan program masih ditemukan beberapa sasaran yang belum sepenuhnya terealisasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa program Jaminan Kecelakaan Kerja di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cilandak, Jakarta Selatan, telah menunjukkan efektivitas yang baik, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan khususnya dalam aspek pencapaian tujuan program secara menyeluruh.

Kata kunci: Efektivitas, Jaminan Kecelakaan Kerja, Analisis

1. LATAR BELAKANG

Tenaga kerja memiliki peran sangat krusial dalam mendukung proses pembangunan ekonomi, baik dalam skala individu maupun nasional. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas tenaga kerja dan perlindungan terhadap setiap tenaga kerja harus menjadi prioritas agar selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi martabat. Dalam konteks ini, pemberian perlindungan kepada tenaga kerja tidak hanya dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan hak-hak mendasar, tetapi juga untuk memastikan adanya kesetaraan dalam akses terhadap peluang kerja serta perlakuan yang adil tanpa diskriminasi.

Perlindungan tersebut menjadi landasan penting dalam upaya menciptakan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya. Di sisi lain, dinamika dunia industri dan usaha juga harus diperhatikan secara seimbang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, aspek keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal fundamental, mengingat kecelakaan kerja dapat terjadi secara tidak terduga dan berpotensi menimbulkan dampak serius.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, pemerintah perlu memberikan jaminan perlindungan yang sesuai dengan hak-hak normatif yang seharusnya diterima oleh para pekerja. Isu keselamatan kerja telah menjadi fokus perhatian baik di kalangan pemerintah maupun pelaku usaha sejak lama, mengingat pentingnya aspek ini terhadap kinerja individu dan institusi secara keseluruhan.

Tersedianya fasilitas keselamatan kerja yang memadai diyakini mampu menurunkan potensi terjadinya kecelakaan kerja secara signifikan. Implementasi program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan langkah strategis dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, serta bebas dari potensi pencemaran, dengan tujuan utama menekan risiko kecelakaan kerja maupun penyakit akibat aktivitas kerja. Dengan demikian, pelaksanaan K3 tidak hanya berdampak positif terhadap efisiensi dan produktivitas kerja, tetapi juga mampu meminimalkan kerugian baik dari sisi pekerja maupun perusahaan. Kecelakaan kerja, selain berpotensi menimbulkan korban jiwa dan kerugian material, juga dapat menghambat jalannya proses produksi secara menyeluruh, merusak lingkungan, dan pada akhirnya berdampak negatif bagi masyarakat luas.

Indonesia memiliki lembaga penyelenggara jaminan sosial yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang diberi mandat untuk mengelola program perlindungan sosial bagi tenaga kerja. Program-program tersebut mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), serta Jaminan Pensiun yang mulai diberlakukan pada 1 Juli 2015.

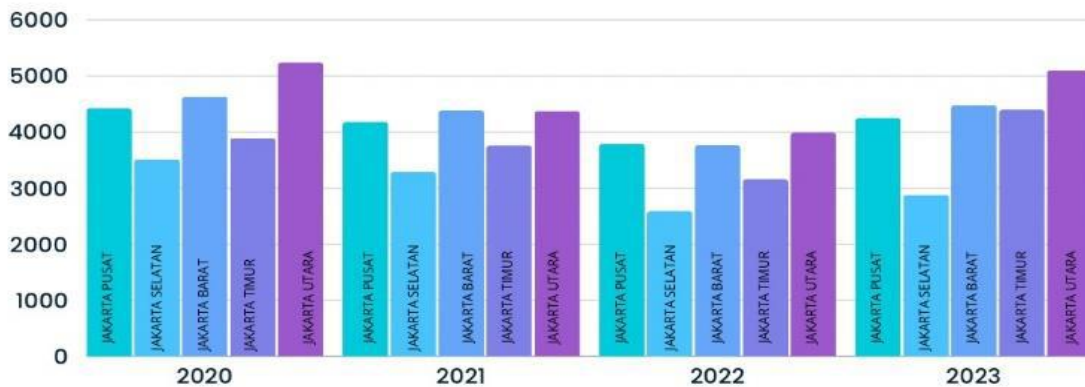
Pelaksanaan jaminan sosial merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menyediakan perlindungan sosial dan ekonomi bagi masyarakat, dengan tetap mempertimbangkan kapasitas fiskal nasional. Sejalan dengan karakteristik negara berkembang pada umumnya, sistem jaminan sosial di Indonesia masih mengadopsi pendekatan funded social security, yaitu skema jaminan yang didanai oleh iuran peserta, dan pada tahap awal penerapannya difokuskan pada kelompok pekerja di sektor formal.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 25 ayat (2) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, cakupan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) meliputi sejumlah komponen. Komponen tersebut mencakup biaya transportasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, biaya pelayanan medis, biaya rehabilitasi, kompensasi berupa penggantian upah selama pekerja dalam kondisi Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), santunan untuk cacat tetap sebagian maupun cacat tetap total, santunan kematian, biaya pemakaman, serta santunan berkala bagi ahli waris tenaga kerja yang meninggal dunia atau mengalami cacat tetap.

Meskipun skema ini telah diatur secara rinci dalam regulasi, implementasi di lapangan masih menunjukkan adanya ketidaksesuaian. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pekerja yang mengalami kecelakaan kerja tidak memperoleh hak atas perlindungan JKK sebagaimana mestinya. Data terkait insiden kecelakaan kerja di Indonesia yang menggambarkan kondisi tersebut disajikan dalam bentuk grafik pada bagian berikut.



GRAFIK ANGKA KECELAKAAN KERJA DKI JAKARTA 2020 - 2023



SUMBER: BPJS KETENAGAKERJAAN JAKARTA DATA PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA 2020-2023

Gambar 1.1 Data Kecelakaan Kerja di DKI Jakarta 2020-2023

Sumber: HSEpedia dan Data BPJS

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa sepanjang tahun 2020-2023, Provinsi DKI Jakarta terdapat peningkatan angka kecelakaan kerja pada periode tahun 2022-2023 sehingga penting bagi seluruh pekerja untuk memahami manfaat dari program yang telah dibuat oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui sosialisasi yang sudah dilakukan.

Berdasarkan data peningkatan angka kecelakaan kerja di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022-2023 maka pengguna yang ingin melakukan klaim manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja dan yang lainnya, maka dari itu efektivitas program yang ada di BPJS Provinsi Jakarta, terutama pada kantor cabang BPJS Jakarta Selatan yang menjadi wilayah paling sedikit terjadinya kecelakaan kerja sepanjang tahun 2020-2023. Manfaat program JKK pada BPJS Ketenagakerjaan sendiri memberikan perlindungan terhadap risiko-risiko kecelakaan yang mungkin terjadi pada lingkungan kerja. Maka dari itu, terdaftar sebagai peserta JKK di BPJS Ketenagakerjaan merupakan hal yang sangat penting bagi seluruh pekerja terkhusus di Jakarta Selatan yang menjadi lokus penelitian ini.

Berdasarkan hal tersebut pentingnya sebuah prosedur yang mudah dan cepat untuk melakukan klaim manfaat yang dilakukan oleh para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Akan tetapi pada praktiknya di lapangan mendapatkan temuan bahwa prosedur pengajuan klaim pada program Jaminan Kecelakaan Kerja yang diterapkan kurang efektif.



Gambar 1.2 Komentar Masyarakat Mengenai Prosedur Klaim JKK

Sumber: Instagram BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan gambar 1.2 dapat dilihat bahwa Masyarakat menilai prosedur klaim pada program Jaminan Kecelakaan Kerja masih cukup sulit, hal ini disampaikan melalui komentar yang diberikan oleh Masyarakat pada akun sosial media BPJS Ketenagakerjaan. Dengan adanya hal tersebut, maka penulis akan mengangkat topik mengenai “Efektivitas Program (JKK) Jaminan Kecelakaan Kerja Pada BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Selatan”

2. KAJIAN TEORITIS

A. Konsep Efektivitas

Dalam konteks organisasi dan program, efektivitas dapat dipahami sebagai derajat keberhasilan suatu kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dengan kata lain, efektivitas mengukur sejauh mana output dan outcome suatu program atau kebijakan mampu mencerminkan tujuan awal yang diharapkan. Gibson et al. (1996) menyatakan bahwa efektivitas berkaitan erat dengan kemampuan individu atau organisasi dalam menyelesaikan tugas secara tepat, dengan

memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien, namun tetap berorientasi pada hasil yang berkualitas.

Efektivitas program adalah suatu penilaian atau pengukuran terhadap sejauh mana kegiatan dalam program-program yang telah dilakukan dapat mencapai tujuan awal dari program tersebut, Efektivitas program dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran program yang telah ditetapkan (Julia, 2010:26).

Hal ini selaras dengan pendapat Robbins dalam Indrawijaya (2010:175), bahwa Efektivitas dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian organisasi berdasarkan tujuan jangka pendek (tujuan) dan jangka panjang (cara). Lebih lanjut menurut Saxena dalam Idrawijaya (2010:175), mengemukakan bahwa Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, waktu) telah tercapai. Tingkat efektivitas semakin tinggi dipengaruhi oleh besarnya target yang dicapai.

Berdasarkan pendapat para ahli, maka dapat diketahui bahwa efektivitas menjadi indikator utama dalam mengevaluasi keberhasilan suatu program atau kebijakan. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila mampu mencapai tujuan secara maksimal, sesuai dengan kriteria dan waktu yang telah ditentukan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi pihak yang dituju.

B. Efektivitas Program

Efektivitas merupakan konsep penting dalam evaluasi kebijakan dan pelaksanaan program, yang digunakan untuk mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran suatu program dapat tercapai secara optimal. Menurut Subagyo (2001), efektivitas adalah tingkat keberhasilan suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Efektivitas tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga mencakup proses yang dilalui serta ketercapaian output dan outcome yang sesuai dengan harapan.

Efektivitas program adalah suatu penilaian atau pengukuran terhadap sejauh mana kegiatan dalam program-program yang telah dilakukan dapat mencapai tujuan awal dari program tersebut, Efektivitas program dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran program yang telah ditetapkan (Julia, 2010:26).

Subagyo (2001) mengatakan Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur Tingkat efektivitas program adalah berikut ini:

- a. Ketepatan sasaran
- b. Pencapaian tujuan
- c. Sosialisasi program
- d. Pemantauan dan evaluasi

Dengan demikian, kajian efektivitas program memberikan dasar yang kuat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program sosial, termasuk dalam konteks perlindungan ketenagakerjaan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan untuk memecahkan permasalahan penelitian dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan menggambarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan secara mendalam dan apa adanya. Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena dalam konteks alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data.

Ciri khas dari metode ini adalah analisis yang bersifat deskriptif dan tekstual, sebagaimana dijelaskan oleh Creswell, yang menekankan pentingnya pemahaman terhadap makna di balik peristiwa yang terjadi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam peristiwa atau kondisi yang sedang berlangsung, dengan menghasilkan data dalam bentuk narasi, baik lisan maupun tulisan, yang relevan dengan kinerja pegawai di BPJS Ketenagakerjaan cabang Jakarta Selatan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketepatan Sasaran Program

Sasaran program merujuk pada kelompok atau individu yang menjadi target dari implementasi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang diselenggarakan oleh Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Selatan Cilandak. Program ini ditujukan untuk menjaring calon peserta yang belum terdaftar, dengan tujuan agar mereka memperoleh perlindungan yang memadai atas risiko kecelakaan yang mungkin terjadi selama menjalankan aktivitas kerja. Melalui perluasan kepesertaan, diharapkan program JKK dapat berfungsi secara optimal dalam memberikan jaminan sosial sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja.

Dalam penelitian ini, analisis efektivitas program merujuk pada teori ukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Subagyo (2001), khususnya pada indikator ketepatan sasaran program. Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana data kepesertaan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Selatan Cilandak telah sesuai dengan kelompok sasaran yang seharusnya menerima manfaat dari program tersebut.

Program Jaminan Kecelakaan Kerja mendapat perhatian khusus dalam pelaksanaannya, mengingat dibandingkan dengan program-program BPJS lainnya, program ini menunjukkan tingkat klaim yang relatif tinggi, sehingga menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas dan relevansi program terhadap kebutuhan peserta.

Berdasarkan hasil observasi langsung, pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Selatan Cilandak dapat dikategorikan berjalan dengan baik, khususnya jika ditinjau dari aspek ketepatan sasaran program. Hal ini tercermin dari upaya aktif yang dilakukan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan, di mana petugas secara langsung melakukan kunjungan ke berbagai perusahaan yang berada di wilayah Jakarta Selatan guna memastikan bahwa para pekerja di sektor formal telah terdaftar sebagai peserta program. Pendekatan ini menunjukkan komitmen institusi dalam menjangkau sasaran program secara tepat dan menyeluruh.

Ketepatan sasaran dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja tercermin dari partisipasi aktif tenaga kerja sebagai penerima manfaat. Hal ini menunjukkan bahwa perancangan program oleh BPJS Ketenagakerjaan telah sesuai dengan kelompok yang menjadi target utama, sehingga mencerminkan keberhasilan dalam aspek ketepatan sasaran.

Kondisi pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Selatan Cilandak saat ini menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal ini tercermin dari implementasi program yang telah menjangkau kelompok penerima manfaat secara tepat, yaitu para pekerja yang berisiko mengalami kecelakaan kerja. Penilaian terhadap ketepatan sasaran ini dapat dilihat dari mekanisme penyelenggaraan program yang dilakukan secara aktif, termasuk kegiatan sosialisasi langsung ke perusahaan-perusahaan serta pendataan peserta secara sistematis. Dengan demikian, program ini dinilai telah berjalan sesuai dengan tujuan utama perlindungan ketenagakerjaan

sebagaimana yang diamanatkan oleh regulasi.

B. Sosialisasi Program

Sosialisasi merupakan suatu upaya terencana dalam menyampaikan informasi, gagasan, atau kebijakan kepada masyarakat luas, dengan tujuan membangun pemahaman bersama. Dalam konteks promosi program, sosialisasi berperan sebagai media penyampaian informasi kepada khalayak yang sebelumnya belum mengetahui keberadaan atau substansi program tersebut. Proses ini menciptakan hubungan komunikasi antara pengirim dan penerima pesan yang bertujuan untuk membangun kesadaran, pemahaman, serta partisipasi aktif.

Sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi mengenai berbagai layanan dan manfaat program kepada masyarakat, dengan maksud memperkenalkan serta menanamkan pemahaman atas pentingnya perlindungan jaminan sosial dalam konteks ketenagakerjaan. Lebih jauh, sosialisasi juga mencakup proses internalisasi nilai, pengetahuan, dan sikap yang dibutuhkan individu agar mampu berperan secara aktif dan bertanggung jawab dalam lingkungan sosial, baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai penerima manfaat program.

Fokus utama dari program Jaminan Kecelakaan Kerja adalah memberikan perlindungan menyeluruh guna menciptakan rasa aman bagi tenaga kerja dalam menjalankan aktivitasnya. Program ini tidak hanya melindungi individu pekerja, tetapi juga memberikan jaminan finansial bagi keluarganya apabila terjadi risiko kecelakaan kerja. Pelaksanaan program ini merupakan bentuk perlindungan sosial yang strategis dan memberikan dampak positif bagi berbagai pihak, termasuk pemilik perusahaan.

Manfaat pada program ini tidak hanya diterima oleh tenaga kerja saja, akan tetapi perusahaan juga diuntungkan karena pekerja mereka mendapatkan jaminan perlindungan yang layak. Program ini mencakup perlindungan terhadap berbagai risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, baik yang terjadi di tempat kerja maupun selama perjalanan dari dan menuju tempat kerja. Selain itu, program ini juga mencakup risiko penyakit akibat lingkungan kerja, sehingga memperluas cakupan perlindungan bagi tenaga kerja secara menyeluruh.

Salah satu manfaat yang diperoleh dari indikator ketepatan sosialisasi program adalah meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja. Manfaat tersebut sejalan dengan tujuan utama BPJS Ketenagakerjaan, yaitu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi tenaga kerja melalui pemberian jaminan sosial yang komprehensif.

Perlindungan yang diberikan tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga memberikan nilai tambah dengan meningkatkan kepercayaan peserta terhadap program. Pemberian perlindungan yang optimal merupakan bentuk layanan proaktif dalam memenuhi, bahkan melampaui, ekspektasi para peserta. Selain itu, pemberian jaminan ini juga bertujuan untuk meminimalkan risiko atau dampak yang ditimbulkan akibat kecelakaan kerja, sehingga mendukung terciptanya lingkungan kerja yang lebih aman dan produktif.

C. Pencapaian Tujuan Program

Secara umum, suatu program dirancang untuk memberikan solusi atas permasalahan tertentu dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaannya. Dalam konteks teknologi informasi, program sering kali diidentikkan dengan aplikasi yang dibuat oleh seorang programmer guna mempermudah proses kerja. Namun, secara lebih luas, program dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis, terpadu, dan terarah untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu.

Tujuan memegang peranan penting dalam menentukan tingkat efektivitas sebuah program, yaitu sejauh mana tujuan tersebut tercapai sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaannya. Adapun tujuan utama dari Program Jaminan Kecelakaan Kerja adalah untuk memberikan perlindungan sosial kepada tenaga kerja atau masyarakat yang menjadi peserta program, dengan cara memberikan jaminan atas risiko kecelakaan kerja dan sekaligus meringankan beban finansial yang timbul akibat kejadian tersebut.

Berdasarkan hasil analisis efektivitas program mengacu pada teori ukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Subagyo (2001), khususnya pada indikator pencapaian tujuan program yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana hasil pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Selatan Cilandak telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, pelaksanaan program tersebut dinilai belum sepenuhnya efektif, mengingat masih terdapat sejumlah tujuan dan harapan yang belum

tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya memenuhi sasaran yang telah dirumuskan, sehingga diperlukan evaluasi dan perbaikan dalam aspek implementasi untuk mencapai tingkat efektivitas yang optimal.

Selanjutnya diketahui bahwa pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Selatan Cilandak masih menghadapi kendala, khususnya terkait dengan proses klaim yang dirasakan cukup sulit oleh sebagian peserta. Kondisi ini menunjukkan adanya hambatan dalam akses terhadap manfaat program, yang dapat memengaruhi persepsi peserta terhadap efektivitas layanan. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah memberikan perhatian lebih dalam aspek penanganan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja, guna memastikan bahwa peserta yang mengalami kecelakaan kerja dapat memperoleh haknya secara cepat, tepat, dan tanpa prosedur yang menyulitkan.

Dalam pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Selatan Cilandak membangun jejaring kerja dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder), baik dari unsur internal maupun eksternal. Stakeholder internal mencakup seluruh pejabat struktural dan pegawai yang terlibat langsung dalam operasional kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat. Sementara itu, stakeholder eksternal meliputi masyarakat penerima manfaat, para tenaga kerja, institusi pelayanan kesehatan (rumah sakit), serta aparat kepolisian.

Setiap stakeholder memiliki peran dan fungsi yang saling melengkapi, dan keterlibatan mereka sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program. Kolaborasi yang efektif di antara para pihak ini menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian tujuan program, khususnya dalam menjamin perlindungan dan pelayanan yang optimal bagi peserta Jaminan Kecelakaan Kerja.

D. Pemantauan dan Pengawasan Program

Pemantauan menjadi bentuk kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Selatan Cilandak sebagai wujud perhatian terhadap perlindungan tenaga kerja dan penerima manfaat. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya deviasi atau ketidaksesuaian antara pelaksanaan program dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui pemantauan tersebut, berbagai kelemahan atau kendala yang muncul dapat dikenali lebih awal sehingga memungkinkan dilakukan upaya perbaikan

atau solusi yang tepat guna meningkatkan efektivitas program secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil penelitian pada indikator pemantauan program merujuk pada teori ukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Subagyo (2001), yang menyatakan bahwa pemantauan merupakan kegiatan yang dilakukan setelah pelaksanaan program sebagai bentuk kepedulian dari pihak pelaksana terhadap para penerima manfaat. Dalam konteks Program Jaminan Kecelakaan Kerja, pemantauan bertujuan untuk menilai keberlangsungan dan efektivitas implementasi program di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemantauan telah berjalan cukup efektif, ditandai dengan adanya komunikasi langsung antara pihak penyelenggara dan peserta program. Interaksi ini memungkinkan evaluasi berkelanjutan serta identifikasi kendala yang mungkin dihadapi oleh para peserta.

Pengawasan internal terhadap pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja di BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh Kepala Cabang melalui kegiatan evaluasi rutin guna memastikan bahwa seluruh rencana kerja telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Selain itu, peserta program juga diberi ruang untuk menyampaikan laporan atau keluhan, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam proses pengawasan internal. Efektivitas pengawasan akan semakin optimal apabila didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi ini mencakup pengelolaan data, penyajian informasi, sistem manajemen, serta digitalisasi proses kerja. Penerapan teknologi informasi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memungkinkan penyelenggaraan layanan publik yang lebih mudah diakses, cepat, dan terjangkau oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan demikian, pemanfaatan teknologi informasi dapat dipandang sebagai sarana strategis yang paling tepat dalam mendukung pelaksanaan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pelayanan publik. Penggunaan teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mampu meminimalkan penggunaan tenaga dan sumber daya lainnya, terutama ketika aplikasi digital digunakan sebagai media utama.

Dalam konteks pemantauan dan pengawasan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, implementasi aksi perubahan dapat dilihat sebagai wujud nyata dari inovasi yang dirancang untuk menghasilkan transformasi sistem yang lebih baik. Agar tujuan inovasi tersebut tercapai secara optimal, diperlukan tahapan yang komprehensif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan uji coba, evaluasi, hingga proses monitoring dan

pengawasan secara berkelanjutan untuk memastikan pencapaian target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada indikator ketetapan sasaran program dalam pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Selatan Cilandak dinilai cukup efektif dalam hal ketepatan sasaran, karena mencakup seluruh tenaga kerja, baik formal maupun informal. Program ini memberikan rasa aman bagi para pekerja di wilayah Jakarta Selatan, karena risiko kecelakaan kerja telah dijamin oleh BPJS setempat.
2. Sosialisasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Selatan Cilandak dinilai cukup efektif. Hal ini terlihat dari upaya penyampaian informasi yang dilakukan secara langsung melalui pertemuan tatap muka dengan perusahaan, serta melalui pemanfaatan media sosial untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas, baik yang sudah menjadi peserta maupun yang belum terdaftar
3. Untuk efektivitas tujuan program dalam pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Selatan Cilandak pada aspek pencapaian tujuan masih belum efektif. Hal ini terlihat dari belum terpenuhinya seluruh harapan baik dari pihak penyelenggara maupun peserta, terutama terkait dengan keterbatasan jaminan yang diberikan kepada pengguna program.
4. Pemantauan pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Selatan Cilandak dinilai efektif. Pengawasan dilakukan secara langsung terhadap perusahaan-perusahaan yang telah mendaftarkan pekerjanya melalui dukungan system teknologi informasi yang sudah disediakan, sebagai upaya memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Afifudin, Beni, 2018, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Pustaka Setia, 88.
- Latif, Y. (2013). Negara paripurna. Gramedia Pustaka Utama.
- Sinambella. 2006. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sinambella. 2011. Asas-Asas Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

- Abuk, E. G., Suprojo, A., & Bagus, N. (2022). Efektifitas Program Peserta BPJS Ketenagakerjaan Pada Lembaga Pendidikan Tinggi (Studi di Bagian Umum dan Kepegawaian Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang) (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik).
- Fitra, N. (2020). Efektivitas Program Pelatihan Karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Padang).
- Fariani, L., Mappamiring, M., & Kasmad, R. (2020). Innovative Organization pada Program One Agency One Innovation Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1(1), 87–100.
- H.M.N.Purwosutjipto, “Pengertian Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (3 Hukum Pengangkutan)”, (Jakarta: Penerbit Djembatan, 2003) halaman. 12.
- Hutagalung, S. (2018). EVALUATION OF LOCAL GOVERNMENT INNOVATION PROGRAM (Analysis of Free Health Service Program (P2KM) in Bandar Lampung).
- Karuni, Ni Made Nadhya, Ni Wayan Supriliyani, & Kadek Wiwin Dwi Wismayanti, (2020). *Studi Tentang Efektivitas Pelayanan Bus Sekolah Gratis Pada Dinas Perhubungan Kota Denpasar*. Vol. 1 No.1 tahun 2020.
- Pertiwi, M., & Nurcahyanto, H. (2018). Efektivitas program BPJS kesehatan di kota Semarang (studi kasus pada pasien pengguna jasa BPJS kesehatan di puskesmas Sronol). *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(2), 416-430.
- Rinata, F., Arsyati, A. M., & Maryati, H. (2019). Gambaran Implementasi Program Rujuk Balik (PRB) BPJS Kesehatan di Puskesmas Wilayah Kerja Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Tahun 2018. *PROMOTOR*, 2(1), 20-26.